



**Jurnal Pendidikan Universitas Garut**  
Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan  
Universitas Garut  
p-ISSN: 1907-932X; e-ISSN: 2579-9274

## Memberdayakan Eksistensi Pesantren

**Iman Saifullah; Hilda Ainissyifa**

Pendidikan Agama Islam, Universitas Garut, Garut

### ملخص البحث

المعهد هو المؤسسات التعليمية الإسلامية الذي لديه مفهوم صياغه فريد من نوعه وذكائه، مع إطار القيم و الفلسفي و التعليم النظري وإدارة المعهدية في تحسين التحصيل الدراسي وتنمية السلوكية العقلية. وينبغي علي التعليمية المعهدية مستندا بالمجتمع (المنهج المجتمع) لنهج الهيكلية والثقافية. أدى المعهد وظيفتها لتعزيز المجتمع ما دام المسلمون قدرة وثقة لدعم وجود المعهد نفسه.

كلمة رئيسية: القيم و الفلسفية و المعهد

### 1. Pendahuluan

Jackson (2004) menggambarkan trend perubahan didalam tren pendidikan moral dan pendidikan agama sejak tahun 1950 tidak terlepas dari perdebatannya dengan pluralitas, dan kemodernan. Kehidupan sosial yang majemuk dengan beragam etnik, agama dan kultur yang beraneka ragam mendorong pendidikan agama harus mampu menjadi identitas dan tata nilai baik bagi individu maupun kultur masyarakat.

Berbicara pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren merupakan tempat yang *representative* untuk membina, mendidik, dan mengembangkan syi'ar-syia'ar agama Islam. Pesantren memberikan gambaran dan informasi pemikiran tentang implikasi sistem pendidikan Islam, serta merumuskan kembali konsep pendidikan Islam yang strategis dan *responsive*. Sistem pesantren memberikan landasan kuat dalam mengembangkan dan memberdayakan sistem pendidikan Islam dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta nilai dan filosofis didalamnya. Implikasi tersebut mengindikasikan upaya penguatan eksistensi melalui pembaharuan sistem pendidikan Islam baik kandungan, proses maupun manajerial.

Pesantren salah satu lembaga Islam yang mempunyai formulasi konsep, saat ini menjadi salah satu *alternative* konsep pendidikan Islam yang banyak di kembangkan di Indonesia untuk terus meneguhkan eksistensinya melalui proses pendidikan yang unik dan cerdas, dengan langkah-langkah membangun kerangka nilai dan filosofis pondok serta teoritis pendidikan, dan membangun manajemen pondok pesantren dalam meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan mental *attitude*.

Melihat fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini banyak kalangan yang mulai melihat sistem pendidikan Pesantren sebagai salah satu solusi untuk terwujudnya produk pendidikan yang tidak saja cerdas, pandai, lihai, tetapi juga berhati mulia dan berakhlaqul karimah, bahkan tujuan

pendidikan akan nilai-nilai Islam menjadi suatu keharusan bagi lembaga pendidikan lebih khusus lembaga pesantren yang mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup manusia. hal ini tergambar dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 129:

رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seseorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Baqarah: 129)

Kekuatan dari pendidikan pesantren jika diberdayakan secara maksimal, dalam pengertian bahwa mendidik tidak saja sebuah kegiatan *transfer of knowledge* tetapi lebih dari itu harus *transfer of value*, pendidikan dimaknai sebagai proses membentuk *attitude* dan sikap sosial dengan baik (Sindhunata, 2001). Pada saat itulah pendidikan sebagai sebuah sistem dan sebagai sub-budaya benar-benar akan memiliki kekuatan sebagai perubah (*agent of change*).

Mendidik dengan mengembangkan aspek kognisi (*transfer of head*) saja hanya akan melahirkan generasi yang pandai tapi lemah moralnya. Atau mengembangkan aspek afeksinya (*transfer of heart*) saja akan melahirkan manusia saleh tetapi lemah intelektualitasnya.

Prinsip keseimbangan (*at-Tawazun*) adalah hal yang sangat penting dalam pendidikan (Sindhunata, 2001), karena manusia memiliki aspek *head*, *hand*, dan *heart* yang merupakan satu komponen utuh dan saling terkait. Dalam hal ini empat pilar pendidikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh UNESCO sangatlah relevan yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be* dan *learning to live together*.

Perlu dicermati bahwa Kompleks dan rumit permasalahan pendidikan agama dalam kehidupan yang beragam menuntut dikembangkannya strategi dan model-model pendidikan yang lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Persoalan-persoalan unik yang muncul dan tumbuh dalam sebuah masyarakat yang plural menuntut adanya gagasan dan praktik pendidikan yang relevan dalam memenuhinya. Pendidikan tidak mungkin dipisahkan relasi atau keterkaitan dengan dimensi politik, ekonomi, budaya, agama dan lain-lain (Jackson, 2004).

Memang jika dilihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa ini, tidak adil rasanya kalau hanya melihat pendidikan sebagai satu-satunya penyebab krisis tersebut. Namun tidak salah memang jika ada orang yang berpandangan seperti itu, mengingat peran sentral dari pendidikan sendiri dan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk membangun sebuah perubahan. Setidaknya, jika ada upaya bersama untuk memaksimalkan potensi dengan memberdayakan (*empowering*) pendidikan khususnya pendidikan Islam –pesantren-, optimisme untuk keluar dari krisis sepertinya bukan sekedar angan-angan belaka meskipun pemberdayaan (*empowerment*) pendidikan tidaklah semudah yang diucapkan karena krisis yang melanda dunia pendidikan kita juga sangat parah.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas perkuatan eksistensi pesantren. Model analisisnya menggunakan sumber utama berupa pemikiran penulis dan dikaitkan dengan referensi yang relevan dengan topik pembahasan. Metoda penyajian menggunakan kerangka analisis kajian

pustaka sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ramdhani & Ramdhani (2014) dan Ramdhani, et al., (2014).

## 2. Pesantren sebagai alternative cerdas

Dalam perjalanannya yang panjang, pesantren sebagai sistem pendidikan yang memiliki akar historis dalam tradisi dan budaya bangsa ini disebut sebagai sistem pendidikan yang *indigenous*. Pesantren telah berkiprah secara nyata pada masa yang dilaluinya; baik sebagai lembaga pendidikan dan Pengajaran Islam, benteng pertahanan Islam, lembaga perjuangan dan dakwah, maupun sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Kiprah semacam ini tentunya harus tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Tetapi persoalannya adalah bagaimana hal itu dilakukan ketika berhadapan dengan tantangan yang semakin rumit dan perubahan yang berlangsung begitu cepat dari arus modernisasi.

Secara umum pesantren atau pondok didefinisikan sebagai “lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, kyai sebagai sentral figurinya dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwoinya” (Zarkasyi, 1994). Sebagai lembaga yang mengintegrasikan seluruh pusat pendidikan, pendidikan pesantren bersifat total, mencakup seluruh bidang kecakapan anak didik; baik spiritual (*spiritual quotient*), intelektual (*intellectual quotient*), maupun moral-emosional (*emotional quotient*). Untuk itu, lingkungan pesantren secara keseluruhannya harus dirancang sebagai lingkungan untuk kepentingan pendidikan. Sehingga segala yang didengar, dilihat, dirasakan, dikerjakan, dan dialami para anak didik (santri), bahkan juga seluruh penghuni pesantren adalah dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan cara ini pesantren telah mewujudkan sebuah masyarakat belajar yang kini dikenal dengan istilah *learning society*.

Lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki basis dan akar kuat pada masyarakat (*grass root*) baik secara institusi, pendanaan dan fasilitas, pemberian wewenang dalam pengelolaan secara penuh memberikan ruang gerak yang luas dalam mengoptimalkan potensi yang ada mulai dari pihak guru (asatidz) dan masyarakatnya. Namun tidak demikian halnya dengan lembaga yang tidak memiliki kesiapan dan tidak mengakar pada masyarakat karena ketergantungan pada pemerintah, lemahnya manajemen lembaga, terbatasnya dana dan sumber daya hal tersebut justru menjadi boomerang dan alamat kehancuran lembaganya. Pesantren memiliki modal yang kuat untuk membentuk karakter para santrinya melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pengembangan kemampuan pada pembelajar untuk berperilaku baik yang ditandai dengan perbaikan berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan), dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia (Ramdhani, 2014; Ramdhani & Muhammadiyah, 2015)

Dalam hal ini memang partisipasi dari masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak. Wujud dari partisipasi tersebut dapat dimaknai oleh lembaga pendidikan dengan menyerap aspirasi yang muncul dari masyarakat, karena keaktifan dan peran serta masyarakat merupakan kunci kesuksesan dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pengelolaan partisipasi masyarakat mendorong hubungan yang baik dalam memperkuat eksistensi pesantren di tengah masyarakat. Tidak saja dalam bentuk materi tetapi lebih dari itu sumbangan tenaga dan fikiran sangatlah diperlukan. Desentralisasi dalam dunia pendidikan juga mengindikasikan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat (*Community-Based Curriculum*), sebuah model pendidikan yang sebagian besar keputusan-keputusannya dibuat oleh masyarakat (Jalal & Supriadi, 2001). Sebuah model pengelolaan yang mengutamakan dorongan (*support*) baik dari dalam pesantren maupun

anggota masyarakat, keterlibatan (*involvement*), kemitraan (*partnership*) dan kepemilikan penuh (*full ownership*).

Pendidikan dengan berbasis masyarakat ini dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan baik oleh intern pesantren maupun masyarakat. Arahnya pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada dengan berorientasi pada masa depan dan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan istilah lain sebuah pendidikan yang lahir dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan hasilnya dinikmati oleh rakyat.

Ada tiga elemen dalam model pendidikan berbasis masyarakat (*Community-Based Education*), yaitu *Pertama*, mementingkan warga belajar, artinya program apa yang dimau, seberapa jauh kemampuannya, kekuatan-kekuatan apa saja yang mampu mendorong motivasi belajar menjadi acuan kebijakan. *Kedua*, program dimulai dari perspektif yang kritis. Pendekatan kritis digunakan untuk melihat dan mengkritisi realitas kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. *Ketiga*, manajemen pengelolaan diatur oleh masyarakat dan didasarkan pada kepentingan masyarakat. Lebih jauh mengenai kurikulum, pendidikan berbasis masyarakat menganut sistem kurikulum terintegrasi, yaitu relevansi materi dengan realitas sosial dan aktualitasnya dengan kebutuhan dan tantangan kehidupan sehari-hari. Mengedepankan prinsip fleksibilitas terutama dalam hal waktu. Keterampilan yang ingin dihasilkan lebih bersifat fungsional karenanya tidak mengutamakan ijazah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan androgogi. Berbeda dengan yang di atas, kurikulum berbasis sekolah (*School-Based Education*) jauh lebih ketat, kaku dan rigid. Semuanya telah disusun dan dirancang dengan mempertimbangkan waktu, tempat, SDM dan fasilitas yang ada. Konsep yang digunakan bersifat umum, menggunakan *terminology pedagogy* dan mengutamakan ijazah (Jalal & Supriadi, 2001).

Jika dicermati pondok pesantren nampaknya merupakan salah satu perwujudan dari model pendidikan tersebut di atas. Mengingat bahwa pesantren lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat (*grass root*) sehingga benar-benar memiliki akar yang kuat dalam masyarakat. Manajemen pengelolaan dalam pesantren dilaksanakan oleh masyarakat pula. Kurikulum pendidikan dalam pesantren pun juga didasarkan pada kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga pesantren tidak kehilangan peran dan relevansinya dengan masyarakat sekitarnya. Pesantren di samping sebagai tempat untuk tafaqquh fiddin, diharapkan juga dapat menjadi Centre of Excellent.

Kondisi yang demikian itu nampaknya menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa pesantren sampai sekarang masih eksis dan justru semakin menunjukkan jati dirinya yang kokoh dan tangguh. Memang beberapa perubahan dan modernisasi telah dilakukan namun itu adalah sebuah kewajaran sebagai tuntutan dari perkembangan dan kemajuan zaman (Azra, 1999). Sejauh perubahan tersebut tidak menyangkut pada nilai dasar dan filosofi dari lembaga yang bersangkutan.

Terdapat sebuah kekuatan yang sangat penting yang ada di sebuah pesantren untuk menjaga eksistensinya dan mampu menjaga akar tradisi, tetap istiqomah dan konsisten melakukan perannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang membuat pesantren tetap bertahan, istiqomah ataupun konsisten melakukan perannya? apabila direnungi, yang menjiwai aspek-aspek kehidupan pesantren adalah nilai-nilai dan falsafah yang menjadi cermin jiwa kehidupan didalamnya, menentukan falsafah hidup santri, bahkan mampu menjadi ruh yang memberikan kekuatan dalam mengelola dan mengatur kehidupan pondok serta memanaje pendidikan pondok dengan tetap tidak "anti modernisasi". Untuk membangun karakteristik demikian, pesantren memiliki kekuatan bertahan, karena memiliki karakteristik budaya organisasi yang kuat. Budaya

organisasi diyakini akan memberikan faktor keunggulan bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan (Ramdhani, et. al., 2017).

Perjalanan pesantren dalam membentuk generasi yang *kamil* tidaklah *instan*, tetapi mengalami proses panjang. Proses penerapan nilai dan falsafah bagi santri yang belajar di pesantren menjadi identitas yang melatarbelakangi terciptanya dinamisasi, sinergitas dan efektifitas kehidupan santri. Tanpa itu pesantren akan kehilangan identitas dirinya, ibarat manusia tanpa roh ibarat perbuatan tanpa niat dan bobot ikhlas.

### 3. Pesantren dalam Menyikapi Perubahan Zaman

Dalam melihat dan mensikapi situasi dan permasalahan tersebut, khususnya dalam upaya melakukan perubahan pada dunia pendidikan kita sebagai langkah kongkrit menuju pemberdayaan pendidikan dan menuju arah perubahan secara menyeluruh, setidaknya dapat digunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan struktural dan pendekatan kultural (Jalal & Supriadi, 2001).

Pendidikan sebagai sebuah sistem memiliki keterkaitan struktural dengan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat dan negara. Upaya membangun kembali pendidikan kita pada hakekatnya adalah sebuah proses sinergis antar kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Pendekatan struktural ini lebih mengupayakan pembenahan dalam konteks keterkaitan (*interrelation*) pendidikan sebagai sebuah sistem kelembagaan dengan sistem pemerintahan negara. Karena bagaimanapun, sebuah negara dibangun atas dasar kepentingan sedangkan pendidikan dilaksanakan atas dasar kesadaran (*conscientization*).

Kebijakan negara, sekecil apapun akan berdampak pada kelangsungan dan arah dari pembangunan (Ramdhani & Santosa, 2012), termasuk di dalamnya dunia pendidikan itu sendiri. Pada masa Orde Baru, pendidikan dijadikan sebagai alat politik dan alat negara dengan dalih stabilitas nasional dalam rangka menjaga kesatuan dan keutuhan negara. Dampaknya pada penyeragaman (kurikulum, kebijakan, dll) mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Sehingga tidak ada ruang sedikitpun bagi daerah untuk berinisiatif terlebih berbeda dengan pusat. Dalam hal ini slogan **Bhinneka Tunggal Ika** ditinggalkan dan dikhianati sendiri. Yang ada adalah *diversity in unity* dan bukan *unity ini diversity*. Pemerintah menutup mata terhadap fenomena pluralitas bangsa, imbasnya pada corak dan model dari pendidikan, yaitu sebuah model pendidikan yang dalam istilah Freire disebut sebagai *pedagogy of oppressed*. Bentuk dari pendidikan ini pada akhirnya hanya akan menciptakan budaya diam (*silent culture*) (Sudiarja, 2001). Diam dalam ketidakberdayaan atas situasi dan kondisi yang ada meskipun ada dorongan dan keinginan untuk berbuat.

Adapun pendekatan kultural (budaya) melihat pendidikan sebagai subjek sekaligus objek dari perubahan. Karena itu pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata pada perubahan sikap dan perilaku mental, moral dan intelektual. Perubahan perilaku pada individu sebagai anggota masyarakat akhirnya akan bermuara pada terciptanya sebuah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati hak-hak sesamanya, yaitu sebuah masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, masyarakat yang mengedapankan nilai, sebuah masyarakat etis (Jalal & Supriadi, 2001), yang dalam istilah Koentowidjodjo yang tidak terjebak pada simbol-simbol materi lahiriah belaka.

Pendekatan budaya melihat individu dalam komponen pendidikan sebagai sebuah diri yang menyatu dalam komunitasnya yang utuh dan integral. Masing-masing memiliki peran untuk menghasilkan suatu nilai dan nilai tersebut pada akhirnya menghasilkan perubahan pada sikap dan perilaku anak didik. Jadi penekanannya pada aspek individu sebagai sebuah pribadi dan tidak secara kolektif.

Dengan dua pendekatan di atas, pesantren memiliki kekuatan yang besar untuk mencerahkan dalam membangun pendidikan yang lebih kondusif dan harmonis adalah sebuah transformasi dialektis. Pendidikan dengan peranannya memberikan kontribusi pada pembentukan karakter dan pembangunan masyarakat dalam rangka membangun bangsa dan negara yang bermartabat.

#### 4. Mencermati Peluang dan Tantangan Pesantren

Eksistensi pesantren kini dan ke depan hanya dapat dipahami dan dijelaskan manakala didudukkan sebagai bagian internal yang tidak terpisahkan dari pasang-surut kehidupan dan potret kaum muslimin di negeri ini. Sistem pendidikan pondok pesantren diakui telah menyumbangkan khazanah keilmuan khususnya keislaman yang tidak sedikit bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam secara umum. Banyak lulusan pondok pesantren yang telah menjadi tokoh-tokoh bangsa, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Adalah sangat tepat, kalau UU Sisdiknas telah mengakui secara hukum lembaga pondok pesantren ini sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini harus dimaknai sebagai *good will* dari pemerintah dalam memperhatikan aspek pendidikan masyarakat sampai ke tingkat paling kecil.

Keinginan baik pemerintah tersebut juga selayaknya direspons secara positif dan pro-aktif oleh pesantren dalam bentuk komitmen sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Peran aktif dari pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan sistem pendidikan pesantren diharapkan akan mengangkat citra lembaga ini di kalangan umat Islam dengan mengembangkan lebih banyak pemikiran-pemikiran keislaman maupun pemberdayaan masyarakat yang berguna bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Situasi sosiologis umat Islam Indonesia saat ini menemukan *new attachmen* kepada Islam merupakan modal yang sangat berharga bagi pesantren. Fenomena kemunculan “pesantren urban”, “sekolah Islam unggulan”, dan sebagainya merefleksikan, bahwa pendidikan pesantren atau yang bermodel pesantren tetap mendapat tempat yang semakin kuat. Saat ini pesantren sendiri dituntut memberdayakan dirinya harus benar-benar mampu menjadi “pendidikan alternatif” dalam menghadapi arus perubahan zaman.

Pesantren harus mampu menciptakan ahli agama (ulama) yang nantinya akan menjadi *mundzirul qoum* bagi umat Islam di Indonesia, disamping menghasilkan lulusan yang kompetitif dan aktif dalam modernisasi dan globalisasi, juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesantren itu sendiri dengan selalu mengupayakan mutu dan kualitas.

Melihat peluang yang ada, pesantren tidak surut dari tantangan yang ada. Percaturan global dengan pesatnya teknologi merupakan tantangan tersendiri di mana informasi dengan dinamika didalamnya dapat langsung diakses dimanapun. Tanpa adanya kemampuan adaptasi dan filter yang baik akan mengakibatkan ruh pesantren terkikis bahkan hilang. Pesantren yang seyogyanya bersinergi dengan masyarakat dihadapkan pada budaya hedonis dan konsumernis masyarakat yang

mewabah dikhawatirkan akan merasuki *mindset* pengelola pesantren sehingga berakibat komersialisasi pesantren.

Tantangan pendidikan Islam di zaman sekarang selain menghadapi pertarungan ideologi-ideologi besar dunia sebagaimana tersebut di atas, juga menghadapi berbagai kecenderungan yang tak ubahnya seperti badai besar (*turbulance*) atau tsunami. Menurut Daniel Bell, di era globalisasi saat ini keadaan dunia ditandai oleh lima kecenderungan: *Pertama*, kecenderungan integrasi ekonomi yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. *Kedua*, kecenderungan fragmentasi politik yang menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Mereka semakin membutuhkan perlakuan yang adil, demokratis, egaliter, transparan, akuntabel, cepat, tepat dan profesional. *Ketiga*, kecenderungan penggunaan teknologi tinggi (*high technologie*) khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TKI) seperti computer dan internet. *Keempat*, kecenderungan interdependensi (kesaling-tergantungan), dimana siasat dan strategi yang dilakukan negara-negara maju untuk membuat negara-negara berkembang bergantung kepadanya demikian terjadi secara intensif. Berbagai kebijakan hegemoni politik seperti yang dilakukan Amerika Serikat misalnya, tidak terlepas dari upaya menciptakan ketergantungan negara sekutunya. Ketergantungan ini juga terjadi di dunia pendidikan. *Kelima*, kecenderungan munculnya penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (*new colonization in culture*) yang mengakibatkan terjadinya pola pikir (*mindset*) masyarakat pengguna pendidikan, yaitu dari yang semula mereka belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan intelektual, moral, fisik dan psikisnya, berubah menjadi belajar untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang besar (Nata, 2014).

## 5. Kesimpulan

Krisis yang terjadi tidak saja dalam ekonomi, politik dan sosial budaya, tetapi juga melanda dunia pendidikan kita. Etika dan moral serta nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara telah luntur dan bahkan hilang. Sehingga tidak salah jika pendidikan sebagai tiang penyangga nilai-nilai luhur tersebut menjadi penyebab awal terjadinya krisis tersebut.

Upaya keluar dari krisis baik di dunia pendidikan dan yang lainnya dapat diatasi dengan membenahi dan memberdayakan eksistensi pendidikan yang ada. Pemberdayaan pendidikan Islam dalam hal ini pesantren, dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan *bottom up* dan *top down*. Perhatian pemerintah sangat diperlukan (subsidi dana, tenaga dan fikiran) disamping penguatan pendidikan berbasis masyarakat (*Community-Based Education*). Basis yang kuat dan kokoh dari masyarakat dan pola pengelolaan pendidikan yang baik pada sisi yang lain dengan memberdayakan potensi dalam dan luar adalah kunci kesuksesan pesantren dengan tetap berjiwa nilai dan falsafah pesantren.

Pola pesantren yang sinergis dan integral dengan manajemen dan pengelolaan yang komprehensif akan menjadikan sebuah lembaga pesantren memiliki mutu dan ciri keunggulan yang berbeda dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain.

Eksistensi pesantren, hubungan langsungnya bukan dengan *masa* atau *era* tertentu, melainkan situasi dan kondisi riil kaum muslimin. Dalam perspektif demikian ini, pesantren dapat menjalankan fungsinya untuk memajukan kaum muslimin di tengah dinamika kehidupan bangsa, manakala kaum muslimin memiliki kemampuan otoritatif untuk mendukung eksistensi pesantren itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Jackson, R. (2004). *Rethinking Religious Education and Plurality*. New York: Routledge Falmer.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Nata, A. (2014). *Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Globalisasi*. Retrieved from <http://mi-daarunnadwah.blogspot.co.id/2014/05/tantangan-dan-peluang-pendidikan-islam.html>
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainissyifa, H. (2017). Conceptual Framework of Corporate Culture Influenced on Employees Commitment to Organization. *International Business Management*, 11(3), 826-803.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A. (2014). Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 8(1), 27-36.
- Ramdhani, M. A., & Muhammadiyah, H. (2015). The Criteria of Learning Media Selection for Character Education in Higher Education. *International Conference of Islamic Education in Southeast Asia*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2012). Key Succes Factors for Organic Farming Development. *International Journal of Basic and Applied Science*, 1(1), 7-13.
- Sindhunata. (2001). *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisus.
- Sudiarja, A. (2001). Pendidikan Radikal Tapi Dialogal. *Basis* 50(2).
- Suharto, T. (2012). *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidika*. Yogyakarta: LKiS.
- Zarkasyi, I. (1994). *Pekan Perkenalan*. Bagian II, Gontor: Darussalam Press.
- Zubaedi. (2009). *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.